



EDISI RABU, 11 JANUARI 2023

### RINGKASAN BERTA HARI INI

## Percepat Pembahasan Raperda, Minta Naskah Akademik Segera Disiapkan

KOTA-Percepat pembahasan Raperda, DPRD Kabupaten Sidoarjo meminta naskah akademik segera disiapkan. Ketua DPRD, Dedy Hartono, mengatakan, pembahasan Raperda harus dipercepat karena sudah memasuki masa sidang II. "Kita harus segera siapkan naskah akademik agar pembahasan Raperda bisa selesai sebelum berakhirnya masa sidang II," ujarnya.

Salah satu Raperda yang dibahas adalah Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Dedy Hartono mengatakan, Raperda ini sangat penting karena berkaitan dengan otonomi daerah. "Kita harus memastikan Raperda ini dibahas dengan serius dan tuntas," katanya.

## Kabupaten Sidoarjo Dianggap Terdepan dalam Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Sidoarjo, Bhirawa - Di Provinsi Jawa Timur, besaran APBD Kab Sidoarjo nomor dua setelah Kota Surabaya. Namun, dalam hal pembayaran pajak daerah berbasis elektronik, Kab Sidoarjo dianggap terdepan. "Kita sudah menerapkan sistem pembayaran pajak elektronik sejak tahun 2018," kata Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs La Ode Ahmad.

## PERDA PAJAK DISAHKAN, FORKOPIMDA LAUNCHING SPPT-PBB VIRTUAL

PERINGATAN PAJAK TERBUKSI Rp 1,215 TRILIUN - Forkopimda Kabupaten Sidoarjo menggelar acara launching SPPT-PBB Virtual. Acara ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda. "Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak daerah," kata Bupati.

## Hadir dalam acara yang diikuti sekitar 400 orang undangan itu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dan Wabup Subandi.

Para anggota Forkopimda, Para pimpinan OPD, Camat di 18 kecamatan, kades dan Kakek di Kab Sidoarjo. Dikatakan La Ode, APBD Kab Sidoarjo tahun anggaran 2022 lalu sebesar Rp4 triliun. Sekitar Rp 1,8 triliun, PAD nya berasal dari 9 pajak daerah yang ada. Seperti PPI, PBB, PHPTB, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, pajak restoran, pajak air tanah dan pajak hiburan. "Kemendagri mengapresiasi Kab Sidoarjo sebagai salah satu daerah terunggul di Indonesia. Salah satunya di bidang perpajakan," katanya.

## 'Semua aspirasi dari pedagang kaki lima Pasar Larangan sudah kami terima dan akan akukan sidak besok ke pasar Larangan'

Prainya. Disinggung ada dugaan pungli pihaknya akan menyampaikan pada OPD terkait yakni Disperindag, selain itu pihaknya juga menghimbau pada pedagang pasar

## Kabupaten Sidoarjo menurunya harus terus mencari strategi dalam meningkatkan capaian pajak daerah.

Dalam waktu tiga tahun terakhir ini, menurut data yang ada, kondisi perpajakan di Kab Sidoarjo terus menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, dirinya berpesan agar Sidoarjo, jangan terlalu terlena dan terlalu bangga dengan APBD Rp4 triliun tersebut. Namun, justru harus ditingkatkan. "Kita harus terus meningkatkan capaian pajak daerah. Kita harus terus mencari strategi dalam meningkatkan capaian pajak daerah. Kita harus terus meningkatkan capaian pajak daerah. Kita harus terus meningkatkan capaian pajak daerah."

## "Pihaknya menghimbau pada pedagang pasar saya minta taat pada perda yang ada yakni PERDA No.1 Tahun 2018 tentang penertiban, penataan dan pemberdayaan pasar kerakyatan, perda tersebut jangan di langgar oleh pedagang pasar termasuk Disperindag dan Satpol PP" pungkasnya.

Disinggung ada dugaan pungli pihaknya akan menyampaikan pada OPD terkait yakni Disperindag, selain itu pihaknya juga menghimbau pada pedagang pasar

## Selain itu PT ISS juga diwajibkan untuk menyetorkan semua uang yang mereka dapatkan dari hasil penarikan retribusi parkir tersebut ke kas daerah. Padahal jika mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak pada April 2022 lalu, PT ISS harusnya memberikan imbal jasa kerjasama ini pada Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 2,67 Miliar perbulannya.

Nilai setoran tersebut harusnya dibayarkan mulai 18 Juli 2022 lalu. Namun menurut pengakuan Benny, PT ISS sama sekali belum memberikan uang tersebut sampai akhir tahun 2022 lalu atau setara dengan Rp 16,02 Miliar. (hans/pram)

## KAPOLRESTA SABET / PENGHARGAAN OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

Sidoarjo, Pojok Kiri - Kapolresta Sidoarjo Komaris Besar Polus Kusumo Wahyu Bintoro, sabet penghargaan atas partisipasi dalam program optimalisasi pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Penghargaan tersebut diberikan Badan Pelayan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Komaris Besar Polus Kusumo Wahyu Bintoro, Selsa (10.1.2023) di Pendopo Delta Wibawa dalam acara launching SPPT-PBB Virtual 2023.

Menerima penghargaan ini, Kapolresta Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Pemkab Sidoarjo serta BPPD Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap melalui ini dapat mendorong capaian daerah dalam pencapaian kinerja daerah. "Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Pemkab Sidoarjo dan BPPD Sidoarjo atas penghargaan ini. Ini adalah bukti dari komitmen kami dalam meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi pajak daerah," katanya.

## Tampung Aspirasi Pedagang, Komisi B Bakal Cek Lahan Belokasi

KOTA-Namun, Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo akan melakukan kunjungan kerja ke lokasi lahan belokasi pedagang kaki lima. "Kita akan mengecek langsung ke lokasi lahan belokasi pedagang kaki lima untuk memastikan bahwa lahan tersebut layak digunakan sebagai lokasi pedagang kaki lima," kata Ketua Komisi B.

## Segera Normalisasi Sungai di Desa Boro dan Kludan

Desa Boro dan Kludan - Dinas Pekerjaan Umum dan Kearsifan Kabupaten Sidoarjo akan segera melakukan normalisasi sungai di Desa Boro dan Kludan. "Kita akan melakukan normalisasi sungai di Desa Boro dan Kludan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah banjir," kata Kepala Dinas.



## Ketua DPRD Dukung 17 Program MAS

Sidoarjo, Memorandum Ketua DPRD Sidoarjo H Usman, mendukung program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan ngobrol santai merajut kebersamaan bertajuk 17 program SidoarjoMAS (Muhdlor Ali Subandi). "Kita dukung semua program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo," kata H Usman.

## Lampau Target Penerimaan Pajak Daerah Sidoarjo Tahun 2022 Capai Rp1,215 Triliun

Sidoarjo, Wene X - Dalam tiga tahun terakhir, capaian penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, target penerimaan pajak daerah telah tercapai sebesar Rp1,215 triliun. "Ini adalah prestasi yang membanggakan bagi Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

## Ajakan Anak Tumbuhan Kesadaran Hukum Sejak Dini

Kepala Polisi sebagai pejabat berwenang di jalan mereka tidak takut jika anak-anak mereka melanggar peraturan lalu lintas. "Kita harus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada anak-anak kita," kata Kepala Polisi.

## Ajakan Anak Tumbuhan Kesadaran Hukum Sejak Dini

Kepala Polisi sebagai pejabat berwenang di jalan mereka tidak takut jika anak-anak mereka melanggar peraturan lalu lintas. "Kita harus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada anak-anak kita," kata Kepala Polisi.

## Ajakan Anak Tumbuhan Kesadaran Hukum Sejak Dini

Kepala Polisi sebagai pejabat berwenang di jalan mereka tidak takut jika anak-anak mereka melanggar peraturan lalu lintas. "Kita harus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada anak-anak kita," kata Kepala Polisi.

## Ajakan Anak Tumbuhan Kesadaran Hukum Sejak Dini

Kepala Polisi sebagai pejabat berwenang di jalan mereka tidak takut jika anak-anak mereka melanggar peraturan lalu lintas. "Kita harus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada anak-anak kita," kata Kepala Polisi.

## Terima Pendemo, Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo : Kami Perjuangkan Aspirasi Pedagang Pasar Larangan

Redaksi 10 Januari 2023 - Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo menerima pendemo pedagang pasar larangan. "Kami akan memperjuangkan aspirasi pedagang pasar larangan," kata Ketua Komisi B.

## Jaga Kelestarian Lingkungan Siswa SD Al Muslim Kompak Tanam Pohon Mangrove

Admin - Siswa SD Al Muslim kompak menanam pohon mangrove di lingkungan sekolah. "Ini adalah kegiatan yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan," kata Kepala Sekolah.

## Ajakan Anak Tumbuhan Kesadaran Hukum Sejak Dini

Kepala Polisi sebagai pejabat berwenang di jalan mereka tidak takut jika anak-anak mereka melanggar peraturan lalu lintas. "Kita harus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada anak-anak kita," kata Kepala Polisi.

## Ajakan Anak Tumbuhan Kesadaran Hukum Sejak Dini

Kepala Polisi sebagai pejabat berwenang di jalan mereka tidak takut jika anak-anak mereka melanggar peraturan lalu lintas. "Kita harus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada anak-anak kita," kata Kepala Polisi.

## Ajakan Anak Tumbuhan Kesadaran Hukum Sejak Dini

Kepala Polisi sebagai pejabat berwenang di jalan mereka tidak takut jika anak-anak mereka melanggar peraturan lalu lintas. "Kita harus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada anak-anak kita," kata Kepala Polisi.

## Ajakan Anak Tumbuhan Kesadaran Hukum Sejak Dini

Kepala Polisi sebagai pejabat berwenang di jalan mereka tidak takut jika anak-anak mereka melanggar peraturan lalu lintas. "Kita harus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada anak-anak kita," kata Kepala Polisi.





Arief Nuryadin menunjuk salah satu mobil operasional siaga desa yang sticker nya ditutupi (dikaburkan) Selasa (10/1/23)

## Pengawasan Mobil Desa Tidak Jalan dan Kurang Tegas

**SIDOARJO**-Sepertinya tidak ada tindakan tegas dari Kecamatan maupun camat wilayah, khususnya terkait masih ditemukan dan adanya mobil operasional siaga desa yang stiker tulisan disamping kanan dan kiri sengaja dihapus atau ditutupi. Hal ini terkesan dengan sengaja menutupi atau menghilangkan nama desa dan wilayah.

Hal tersebut sangatlah bisa merugikan masyarakat, bagaimana tidak bila terjadi sesuatu masyarakat desa bersangkutan maupun tidak, tidak bisa mengenali atau tahu itu mobil operasional desa mana. Hal ini kalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau kehilangan.

Seperti disampaikan warga Sidoarjo, Meta(39) dirinya sering melihat mobil siaga desa stikernya tidak ada, alias dikupas, dan tidak tahu itu mobil desa mana.

"Banyak juga dijumpai tulisan nama desa dan kecamatan yang hilang atau sengaja ditutupi. Ini butuh tindakan tegas camat agar menegur Kades atau Pemdes, agar memantau keadaan mobil milik pemerintah (negara)," ungkap Meta.

Hal ini tidak ada tindakan maupun

teguran tegas dari Camat setempat (wilayah) khususnya selaku atasan.

Senada Arief Nuryadin, S.Pd., SH, MM, Ketua divisi hukum dan advokasi LSM Government Watch Nasional mobil siaga desa Suzuki APV yang diberikan Pemkab kepada desa ada stikernya atau tulisan nama desa dan kecamatan dihilangkan atau ditutupi sticker lain. Salah satunya seperti ini milik operasional yang sengaja ditutupi milik Pemdes Desa Sukodono Kecamatan Sukodono, itu tidak benar.

"Artinya pengawasan terhadap penggunaan mobil aset desa oleh camat itu tidak jalan, atau tutup mata dan tulisan yang menunjukkan itu aset desa serta sengaja dilepas atau ditutup menggunakan isolasi itu jelas sebuah pelanggaran bentuk mengkaburkan aset negara," tegas Arief.

Masih kata Arief Nuryadin karena itu terjadi di hampir setiap kecamatan ada pelanggaran seperti itu, maka fungsi camat sebagai atasan desa sekaligus sebagai pengawas tidak jalan.

"Diharapkan camat harus tegas menyikapi hal itu, dan menindak desa yang sengaja mengkaburkan tulisan mobil aset desa tersebut," pungkasnya. ● loe





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Ajak Anak Tumbuhkan Kesadaran Hukum Sejak Dini

### Sidoarjo, Memorandum

Polisi sahabat anak merupakan salah satu program Polri yang rutin diselenggarakan. Program tersebut mengajak anak PAUD (pendidikan anak usia dini), TK, hingga SD belajar sambil bermain mengenai peraturan hukum.

Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini serta menghilangkan kesan polisi galak di mata anak.

Seperti yang dilakukan Polsek Wonoayu, Polresta Sidoarjo, Selasa (10/1). Polsek Wonoayu mengundang murid TK Darmawanita Persatuan Ploso Wonoayu Sidoarjo ke Mapolsek Wonoayu. Anak-anak tersebut diperkenalkan mengenai tugas Kepolisian serta

beberapa peraturan yang perlu untuk mereka ketahui.

Kapolsek Wonoayu AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, kegiatan tersebut sebagai sarana memperkenalkan Polri kepada anak sejak usia dini serta menghilangkan kesan polisi galak di mata anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak takut lagi dengan polisi.

"Dengan program ini kami harap anak-anak tidak takut lagi

kepada Polisi sehingga apabila bertemu di jalan mereka tidak takut lagi untuk menyapa, bertanya, bahkan meminta bantuan kepada petugas," ujar AKP Hafid.

Anak-anak tersebut diberi materi mengenai rambu lalu lintas, peraturan di jalan, hingga penggunaan helm sebagai salah satu standar keselamatan di jalan. Pemberian materi dilakukan dengan interaktif dan menyenangkan sehingga anak menjadi tidak bosan dan dapat menangkap materi yang diberikan.

"Tentunya memberikan pengetahuan hukum kepada anak ada seni tersendiri, agar

materi yang diberikan dapat terserap dengan baik kami ajarkan dengan cara yang semudah mungkin dan sesenang mungkin agar mereka enjoy dan dapat menerima materi dengan baik," jelas Kapolsek Wonoayu.

Murid TK Darmawanita Persatuan Ploso Wonoayu Sidoarjo sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan berjalan dengan lancar dan di akhiri dengan sesi foto bersama. (jok/mik)

### PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Surabaya HR Muhammad akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, terhadap jaminan debitur:

No	Nama Debitur	Obyek Lelang	Harga Limit	Jaminan	Batas Akhir Penawaran Lelang / Pembukaan Penawaran dan Penetapan Pemegang Lelang
1	Lilik Rahayu,SH, MKN	Tanah seluas 650 m <sup>2</sup> atas nama LILIK RAHAYU,SH,M Kn sesuai SHM No. 4187			

**MEMORANDUM**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



**TERSUMBAT:**  
Wakil Bupati  
Sidoarjo Subandi  
(tiga dari kanan)  
meninjau kondisi  
saluran air di Desa  
Boro, Kecamatan  
Tanggulangin,  
Sidoarjo,  
kemarin (10/1).

DIMAS MAULANA/JAWA POS

## Segera Normalisasi Sungai di Desa Boro dan Kludan

### Bangun Dam dan Tertibkan Bangunan Liar

**SIDOARJO** - Sungai Gedang Rowo di Desa Boro hingga Desa Kludan di Kecamatan Tanggulangin kemarin penuh enceng gondok. Kondisi sungai juga menyempit karena ada beberapa bangunan liar yang menempel hingga bibir sungai. Melihat kondisi tersebut, Wakil Bupati Subandi meminta agar sungai tersebut segera dinormalisasi.

Subandi meminta sungai tidak hanya dibersihkan, tapi juga dilebarkan. Plus ada pembangunan dam sungai. "Kondisi

sungai seperti ini harus dinormalisasi. Jangan terus menyempit, bahkan banjir," ujar Subandi. Agar normalisasi berjalan lancar, bangunan liar yang memakan pinggir sungai juga harus ditertibkan.

Nanti pihaknya mengidentifikasi dulu bangunan liar yang ada di sepanjang sungai. Subandi akan berkomunikasi dengan pemilik bangunan liar tersebut. "Kami akan cek, komunikasikan dengan pemilik dulu," katanya. Jika nanti tidak ada iktikad baik dari pemilik untuk membongkar, padahal berada di lahan milik sungai, pihaknya akan menertibkan secara langsung.

Kepala Desa Boro M. Soichunnuruddin

mengaku penyempitan sungai tersebut sudah berlangsung lama. Lebih dari dua tahun. "Kondisinya sudah begini saat saya menjabat dua tahun yang lalu," ujarnya. Dia mengaku karena ada bangunan di sungai tersebut, kondisi sungai menyempit. Saat hujan deras, air kerap meluber di sekitar lokasi. "Karena banyak sampahnya, banyak tanaman enceng gondoknya," ujarnya. Inginnya, normalisasi bisa segera dilakukan. Jangan sampai menunggu musim hujan datang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, sungai tersebut masuk

agenda normalisasi pada tahun ini. "Rencananya, kami akan normalisasi secara swakelola," ujarnya. Terkait bangli di sana, pihaknya akan menertibkan. Namun, masih menunggu identifikasi terlebih dahulu. "Saat ini belum teridentifikasi jumlahnya," katanya.

Sebelum penertiban, pihaknya juga menunggu surat dari wilayah seperti dari pemerintah desa dan kecamatan terkait kepastian bangunan yang berada di sekitar sungai. "Jadi, ada kejelasan mana yang memang liar. Agar dalam penertiban nanti sudah ada dukungan dari pihak wilayah bahwa bangunan tersebut memang liar," jelasnya. (uzi/c6/any)

## Jawa Pos



## ✓ Hilangkan Kesan Galak, Polisi Dekatkan dengan Anak

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Polisi sahabat anak merupakan salah satu program Polri yang rutin diselenggarakan. Program tersebut mengajak anak PAUD, TK, hingga SD belajar sambil bermain mengenai peraturan hukum. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini serta menghilangkan kesan polisi galak di mata anak.

Seperti yang dilakukan Polsek Wonoayu, Selasa (10/1). Polisi mengundang murid TK Darmawanita Persatuan Ploso ke Mapolsek Wonoayu. Anak-anak tersebut diperkenalkan mengenai tugas kepolisian serta beberapa peraturan yang perlu untuk mereka ketahui.

Kapolsek Wonoayu AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, kegiatan tersebut sebagai sarana memperkenalkan Polri kepada anak sejak usia dini. Serta menghilangkan kesan polisi galak di mata anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak takut lagi dengan polisi.

"Dengan program ini kami harap anak-anak tidak takut lagi kepada polisi. Sehingga apabila bertemu di jalan, mereka tidak takut lagi untuk menyapa, bertanya, bahkan meminta bantuan kepada petugas," ujar AKP Hafid.

Anak-anak tersebut diberi materi mengenai rambu lalu lintas, peraturan di jalan, hingga penggunaan helm sebagai salah satu standar keselamatan di jalan. Pemberian materi dilakukan dengan interaktif dan menyenangkan sehingga anak menjadi tidak bosan dan dapat menangkap materi yang diberikan.

"Tentunya memberikan pengetahuan hukum kepada anak ada seni tersendiri. Tujuannya agar materi yang diberikan dapat terserap dengan baik kami ajarkan dengan cara yang semudah mungkin dan sesenang mungkin agar mereka enjoy dan dapat menerima materi dengan baik," ujar kapolsek Wonoayu.

Murid TK Darmawanita Persatuan Ploso Wonoayu Sidoarjo sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama. (cat/rd)



Program Polisi Sahabat Anak di Polsek Wonoayu.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro SH Sik saat menerima penghargaan

## KAPOLRESTA SABET PENGHARGAAN OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

### Sidoarjo, Pojok Kiri

Kapolresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro, sabet penghargaan atas partisipasi dalam program optimalisasi pajak daerah Kabupaten Sidoarjo.

Penghargaan tersebut diberikan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Penghargaan diserahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kepada Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, Selasa (10/1/2023) di Pendopo Delta Wibawa dalam acara launching SPPT-PBB Virtual 2023.

Menerima penghargaan ini, Kapolresta Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Pemkab Sido-

arjo serta BPPD Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap melalui turut serta optimalisasi pajak daerah dapat mewujudkan percepatan kemajuan daerah.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, juga mengucapkan selamat atas diluncurkannya SPPT-PBB Virtual. Terobosan ini tentu semakin memudahkan pelayanan pajak bagi masyarakat.

"Penyampaian SPPT-PBB virtual, semoga lebih memudahkan dan lebih cepat tepat tersampaikan ke masyarakat bila dibandingkan dengan penyampaian SPPT secara manual yang dilakukan selama ini melalui desa, kelurahan ataupun petugas pajak," harapnya. (Khol/Fs)



Arief menunjuk salah satu mobil operasional siaga desa yang sticker nya ditutupi(dikaburkan), Selasa (10/1/23)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT

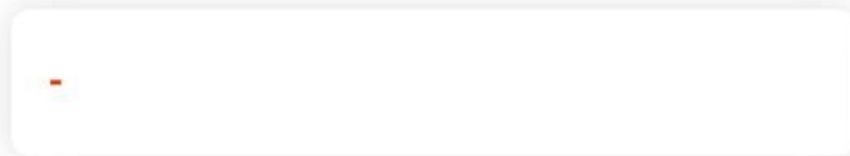




# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Padahal sebagaimana disebutkan Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Benny Airlangga dalam pemberitaan di media ini beberapa hari lalu, Pemkab Sidoarjo sudah memutuskan untuk membatalkan kontrak kerjasama dengan PT ISS dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus.



Keputusan itu sudah disampaikan pada manajemen PT ISS melalui surat resmi yang dikirimkan pada 2 Januari lalu. Dalam surat itu, Dishub memberikan batas waktu hingga Senin (09/01/2023) kemarin pada rekanannya itu untuk menghentikan penarikan retribusi parkir dan menyerahkan kembali area yang dikelolanya sejak Juni 2022 lalu pada Pemkab Sidoarjo.





Selain itu PT ISS juga diwajibkan untuk menyetorkan semua uang yang mereka dapatkan dari hasil penarikan retribusi parkir tersebut ke kas daerah. Padahal jika mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak pada April 2022 lalu, PT ISS harusnya memberikan imbal jasa kerjasama ini pada Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 2,67 Miliar perbulannya.

Nilai setoran tersebut harusnya dibayarkan mulai 18 Juli 2022 lalu. Namun menurut pengakuan Benny, PT ISS sama sekali belum memberikan uang tersebut sampai akhir tahun 2022 lalu atau setara dengan Rp 16,02 Miliar.  
*(hans/pram)*





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



☆ Berita Utama

▶ BERITA TV

🕒 Terkini

## Abaikan Surat Dishub Sidoarjo, Sampai hari Ini PT ISS Masih Pungut Retribusi Parkir

Admin

Tuesday, January 10, 2023, January 10, 2023 WIB

J



*Jukir PT ISS yang masih melakukan penarikan retribusi parkir di GOR Sidoarjo, malam tadi.*





**DNN, SIDOARJO – Meski sudah dideadline untuk menghentikan seluruh aktifitasnya per 9 Januari kemarin, namun PT Indonesia Sarana Service (ISS) masih tetap menarik retribusi parkir di lokasi-lokasi yang dikuasainya.**

**Dari hasil pantauan lapangan yang dilakukan Selasa (10/01/2023) malam tadi, para juru parkir yang dipekerjakan perusahaan rekanan Pemkab Sidoarjo itu di GOR Gelora Delta Sidoarjo masih tetap bekerja seperti biasanya.**

**Disisi timur kawasan olahraga itu misalnya, masih terlihat ada enam orang jukir yang bertugas. Empat orang diantaranya berjaga di pintu masuk untuk menarik uang parkir dari pengendara mobil dan motor sambil menyerahkan tiket parkir berlogo PT ISS. Sedangkan dua orang lainnya berada di pintu keluar.**





## Rumah Nyaris Ambruk, Belum Pernah Terima Bantuan Pemkab Sidoarjo

### Perempuan Hamil Tua Asal Tropodo Krian

Sidoarjo, Memo X

Nanik Hariyati warga Dusun Balaipanjang, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo yang sedang hamil tua hanya bisa meratap sebagian bangunan rumahnya yang nyaris. Rumah itu hingga kini masih ditempatinya bersama keluarganya meski dalam kondisi nyaris ambruk.

Ironisnya, perempuan Malang ini hingga kini belum pernah mendapat bantuan program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemkab Sidoarjo. Padahal, selama ini Nanik Hariyati bekerja sebagai buruh cuci rumah tangga dengan sekuat tenaga membantu suaminya yang kerja serabutan untuk menghidupi keluarganya.

Namun, sayangnya karena keterbatasan ekonomi dia tidak bisa berbuat banyak atas kondisi rumahnya yang nyaris ambruk



**NYARIS AMBRUK** - Rumah Nanik Hariyati warga Dusun Balaipanjang, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo yang nyaris ambruk sangat memprihatikan butuh bantuan Pemkab Sidoarjo, Senin (09/01/2023).

itu. Bahkan sewaktu-waktu bangunan itu bisa roboh dan mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya.

"Kami belum pernah mendapat

bantuan dari pemerintah. Baik itu dalam program PKH, BPNT maupun BLT. Padahal, kondisi ekonomi keluarga kami benar-benar tidak mampu. Jangankan untuk memperbaiki rumah yang mau ambruk, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami saja masih kekurangan," ujar Nanik Hariyati yang menunggu proses persalinan anak kedua itu, Senin (09/01/2023).

Nanik menceritakan selama ini dirinya pernah mengajukan perbaikan rumahnya yang kondisinya memprihatikan itu

agar mendapat bantuan. Dirinya mengajukan ke pihak RT setempat berkali-kali dan pihaknya desa. Akan tetapi, hasilnya selalu kandas alias tidak mendapatkan kesempatan program bantuan pemerintah.

"Saya sudah berulang kali mengajukan bantuan perbaikan kondisi rumah yang nyaris ambruk ini untuk dapat bantuan sosial ke Pemdes melalui RT. Tapi, sampai hari ini belum ada tanggapan dan belum membuahkan hasil sama sekali. Padahal, KK saya asli warga Tropodo," ungkap Nanik.

Karena sebagian atap rumahnya sudah bocor, Nanik mengakui rumahnya itu untuk tempat tinggal dirinya bersama suaminya Helda Pratama bersama seorang putranya, Rendi. Kondisi rumahnya terparah di bagian bangunan kamar tidur. (par/wan)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## LAKUKAN MEDIA BRIEFING, DJP BERI INFORMASI PAJAK TERUPDATE

### Sidoarjo, Pojok Kiri

Direktorat Jenderal pajak (DJP) baru saja melakukan media briefing untuk memberikan informasi perpajakan terkini kepada awak media. Materi yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dengan didampingi jajarannya.

"Hari ini, kami mencoba untuk menyampaikan beberapa update ataupun penambahan penjelasan (atas) beberapa isu yang kemarin beredar di publik secara umum agar terdapat kesamaan persepsi kebijakan perpajakan," kata Dirjen Pajak di media center Kantor Pusat DJP.

Pertama, Dirjen Pajak menyampaikan kembali pilar-pilar reformasi perpajakan, yakni pilar organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Melalui perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam koridor reformasi perpajakan tersebut, salah satu hasil dari keberhasilan tersebut tercermin pada keberhasilan DJP mencapai target penerimaan pajak dua tahun terakhir.

Pada pilar peraturan perundang-undangan, perbaikan regulasi telah dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Per-

pajakan (UU HPP). Untuk mengelaborasi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan satu peraturan pemerintah (PP) di bidang Pajak Penghasilan (PPh), satu di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan dua di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni, PP-55/2022, PP 50/2022, PP-44/2022, dan PP-49/2022.

"Saya perlu tekankan bahwa pengaturan dalam keempat peraturan pemerintah ini bukanlah pengaturan baru melainkan pelaksanaan atau elaborasi dari UU HPP sehingga tidak lepas dari UU HPP," kata Suryo.

Terkait ketentuan perlakuan PPh atas natura/kenikmatan, Dirjen Pajak menegaskan bahwa mekanisme natura/kenikmatan yang diatur dalam UU HPP dan PP-55/2022, yakni menjadi dapat dibebankan dan menjadi objek PPh (taxable and deductible) bertujuan meningkatkan keadilan dan lebih tepat sasaran.

Suryo menjamin mekanisme ini tidak akan mengganggu pekerja yang selama ini mendapat fasilitas yang menunjang pekerjaannya. Saat ini DJP sedang menyusun rancangan peraturan menteri keuangan untuk mengatur lebih lanjut natura/kenikmatan yang dike-

cualikan dari pengenaan PPh. Rencana natura/kenikmatan yang akan dikecualikan antara lain, bingkisan dengan batasan tertentu, peralatan dan fasilitas seperti laptop dan ponsel, fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai jabatan manajerial, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

Selanjutnya, disampaikan pula rencana simplifikasi pengaturan atas penghitungan PPh pasal 21. Nantinya, mekanisme penghitungan PPh pasal 21 yang selama ini dirasa membingungkan karena memiliki kurang lebih 400 skenario penghasilan, diubah menggunakan skema tarif efektif (TER). Tarif efektif ini akan tersedia dalam tiga tabel tarif yang sudah memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi setiap jenis status PTKP. Skema ini akan memudahkan penghitungan karena wajib pajak tinggal mengalikan tarif efektif tersebut dengan penghasilan bruto setiap masa pajaknya. Informasi berikutnya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sampai dengan 8 Januari 2023 dinyatakan sudah ada 53 juta NIK terintegrasi dengan NPWP dari total 69 juta NIK. Dirjen Pajak mengimbau wajib pajak



orang pribadi dalam negeri segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP melalui portal dponline [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) agar manfaat integrasi dapat segera dirasakan. Selain itu, Dirjen juga menyampaikan realisasi SPT Tahunan tahun pajak 2022. Mulai 1

Januari 2023 sampai dengan hari ini, pukul 08.05 WIB, DJP sudah menerima 194.122 SPT Tahunan orang pribadi dan 9.416 SPT Tahunan badan. "Untuk SPT Tahunan 2022 sendiri, selama tahun 2022, SPT yang disampaikan ke DJP ada 17,20 juta SPT, meningkat dari SPT Tahunan 2021 yang sebanyak 16,46 juta SPT," pungkas Suryo.

Dalam kegiatan ini, tu-

rut hadir Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ihsan Priyawibawa, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Perpajakan Aim Nursalim Saleh, dan Plt. Direktur Peraturan Perpajakan II Teguh Budiharto.

Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). #PajakKuatIndonesiaMaju. (Khol/Ben)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Beri Diskon Pajak Sebesar 50 Persen untuk Peserta PTSL

SIDOARJO - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo me-launching surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) digital dan pembayaran PBB lewat QRIS di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin (10/1). Dalam kesempatan itu, BPPD Sidoarjo juga memberikan penghargaan kepada institusi dan pribadi atas kontribusi mereka pada pajak daerah.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menilai, inovasi digital tersebut akan mendorong realisasi pajak. Apalagi, Pemkab menargetkan realisasi pajak daerah tahun ini sebanyak Rp 1,230 triliun. Dia menilai, tiga tahun ini ada kenaikan realisasi pajak. "Itu capaian positif, rekor. Realisasi selalu di atas target," ungkapnya. Karena itu, Pemkab berani memasang target besar tahun ini meski ada isu resesi.

Sebagai dorongan percepatan realisasi, Pemkab tahun ini juga memberikan diskon 50 persen pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Namun, khusus BPHTB bagi warga yang mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Totalnya ada sekitar 17 ribu. Agar peserta PTSL tidak terlalu terbebani dengan pajak BPHTB, Muhdlor optimistis, dengan sejumlah inovasi tersebut, target realisasi pajak tahun ini bisa tercapai.

Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono akan berupaya mengoptimalkan potensi pajak yang ada. Antara lain dengan percepatan SPPT digital agar surat cepat sampai ke wajib pajak dan bisa segera dibayar. Selain itu, lewat optimalisasi potensi pajak yang ada. Salah satunya dengan penambahan alat perekam transaksi baik di hotel, kafe, rumah makan, maupun restoran. Dengan begitu, pihaknya bisa memantau langsung transaksi yang dilakukan wajib pajak secara *real time*. Tujuannya, mengantisipasi adanya laporan yang tidak sesuai transaksi sebenarnya.

Saat ini, sudah terpasang 231 alat perekam. "Tahun ini kami perbanyak lagi, hingga total nantinya ada 400 lebih alat perekam yang terpasang," ungkapnya.

Ari menyebut alat itu sangat efektif dan cepat memantau jumlah transaksi dan berapa pajak yang harus dibayarkan. (uzl/c17/any)

## Jawa Pos

## Forkopimda Sidoarjo Luncurkan SPPT-PBB Virtual

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Forkopimda Sidoarjo kompak meluncurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Virtual, di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (10/1).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, capaian penerimaan pajak tahun 2022 melebihi target. Dari target Rp. 1,068 triliun, diperoleh Rp. 1,215 triliun. "Capaian pajak di tahun 2022 ini menjadi rekor sepanjang sejarah Rp 1,215 triliun," ucapnya.

Ia berharap penerimaan pajak di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Target Rp. 1,230 triliun di tahun 2023 ini diharapkan dapat tercapai. Bahkan dapat terlampaui seperti target tahun 2022. Untuk itu ia akan terus mendorong pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Salah satunya dengan launching SPPT-PBB Virtual.

"SPPT-PBB sudah mengarah pada digital. Masyarakat dapat membayar pajak pada gerai-gerai terdekat, termasuk oleh BUMDes, sehingga ke depan tidak ada lagi wajib pajak kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak," tandas Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor.

Gus Muhdlor berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan perolehan pajak daerah. Terutama forkopimda. Dikatakannya, saat ini masih ada dua daerah di Indonesia yang telah menyelesaikan perda pajaknya. Salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Dan hal ini tidak terlepas dari sinergi Forkopimda Sidoarjo.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, pengoptimalan perolehan pajak terus dilakukan. Salah satunya melalui SPPT-PBB secara virtual. Kini pemberitahuan SPPT-PBB dilakukan secara digital melalui email maupun WhatsApp.

Layanan tersebut memudahkan perusahaan maupun masyarakat untuk mengecek tagihan SPPT PBB P2 sekaligus pencetakannya. "Kami juga telah menyelesaikan sistem virtual pajak daerah lainnya. Pajak hotel, restoran, reklame, virtualisasi pajaknya sudah kita selesaikan tahun 2022," bebernya. (sta/rd)



Forkopimda Sidoarjo saat peluncuran SPPT-PBB Virtual, Selasa (10/1).





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Kabupaten Sidoarjo Dianggap Terdepan dalam Pembayaran Pajak Secara Elektronik

### Sidoarjo, Bhirawa

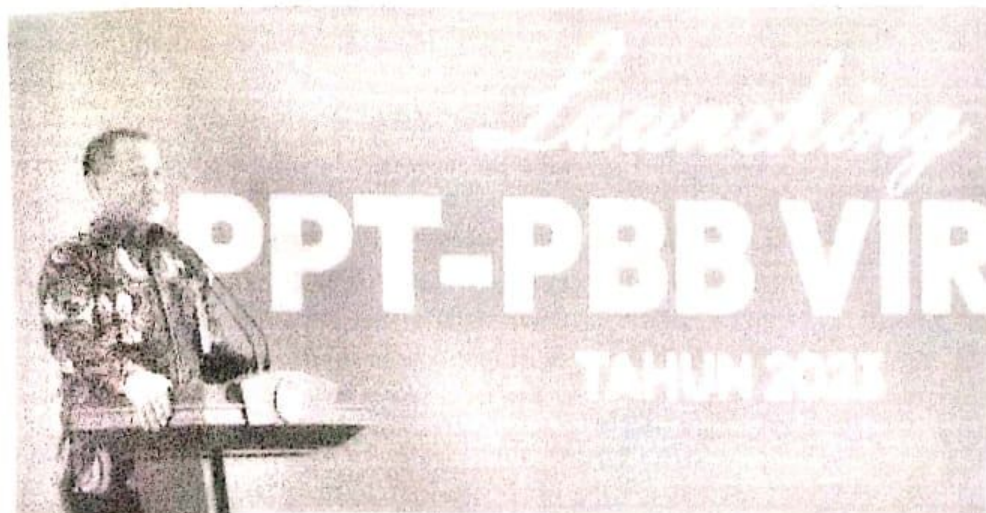
Di Provinsi Jawa Timur, besaran APBD Kab Sidoarjo nomor dua setelah Kota Surabaya. Namun, dalam hal pembayaran pajak daerah berbasis elektronik, Kab Sidoarjo dianggap terdepan. Demikian diutarakan oleh staf ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr drs La Ode Ahmad, Selasa (10/1) kemarin, yang hadir dalam acara launching surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB secara virtual, di pendopo Delta Wibawa Kab Sidoarjo.

Hadir dalam acara yang diikuti sekitar 400 an orang undangan itu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dan Wabup Subandi. Para anggota Forkopimda, Para pimpinan OPD, Camat di 18 kecamatan, kades dan Kakel di Kab Sidoarjo.

Dikatakan La Ode, APBD Kab Sidoarjo tahun anggaran 2022 lalu sebesar Rp4 triliun. Sekitar Rp 1.8 triliun, PAD nya berasal dari 9 pajak daerah yang ada. Seperi PPJ, PBB, BPHTB, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, pajak restoran, pajak air tanah dan pajak hiburan. "Kemendagri mengapresiasi Kab Sidoarjo sebagai salah satu daerah terunggul di Indonesia. Salah satunya di bidang perpajakan," katanya.

Dalam waktu tiga tahun terakhir ini, menurut data yang ada, kondisi perpajakan di Kab Sidoarjo terus menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, dirinya berpesan agar Sidoarjo, jangan terlalu terlena dan terlalu bangga dengan APBD Rp.4 trilion tersebut. Namun, justru harus ditingkatkan.

Kabupaten Sidoarjo menurutnya harus terus mencari strategi dalam meningkatkan capaian pajak daerah. Semua OPD, menurut ia harus bisa ikut terlibat dalam peningkatan pajak daerah, sesuai dengan Tupoksinya. Dalam kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah pihak terkait, masalah perpajakan di Sidoarjo, oleh Bupati Sidoarjo. [kus.ca]



Dr drs La Ode Ahmad. / staf ahli Kemendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.



## Lampau Target

# Penerimaan Pajak Daerah Sidoarjo Tahun 2022 Capai Rp1,215 Triliun

### Sidoarjo, Memo X

Dalam tiga tahun terakhir, capaian penerimaan pajak daerah Pemkab Sidoarjo mengalami peningkatan. Tahun 2022 kemarin mencatatkan angka pencapaian pajak daerah sebesar Rp 1,215 triliun. Pendapatan ini bukan hanya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja. Namun juga dari berbagai jenis pungutan pajak lainnya. Seperti pajak hotel, restoran, air tanah, pajak reklame maupun pajak parkir serta BPHTB.

Besaran pencapaian penerimaan pajak itu disampaikan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali saat melaunching SPPT - PBB Virtual di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (10/01/2023). Menurutnya, pencapaian penerimaan pajak Tahun 2022 melebihi target. Dari target Rp 1,068 triliun diperoleh sebesar Rp 1,215 triliun.

"Ini menunjukkan pencapaian pajak Tahun 2022 ini menjadi rekor sepanjang sejarah dengan nilai Rp 1,215 triliun," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini.

Karena itu, Gus Muhdlor berharap penerimaan pajak di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Target Rp 1,230 triliun di Tahun 2023 ini dapat tercapai. Bahkan, dapat terlampaui seperti target Tahun 2022 kemarin. Untuk itu, dirinya akan terus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah. Salah satunya dengan launching SPPT - PBB Virtual itu.

"SPPT-PBB sudah mengarah pada pelayanan digital. Masyarakat Sidoarjo diharapkan dapat membayar pajak pada gerai-gerai terdekat. Termasuk membayar di BUMDes agar ke depan tidak ada lagi wajib pajak kesulitan melakukan pem-



LAUNCHING - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali bersama Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono dan Forkopimda Sidoarjo melaunching SPPT - PBB Virtual di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (10/01/2023).

bayaran pajak," ungkap Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Tidak hanya itu, Gus Muhdlor juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan perolehan target pajak daerah. Terutama, Forkopimda Sidoarjo yang selalu bersinergi membangun Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, saat ini masih ada dua daerah di Indonesia yang menyelesaikan Perda Pajak Daerah. Salah satunya Kabupaten Sidoarjo.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi Forkopimda Sidoarjo. Karena Kabupaten Sidoarjo menjadi satu dari dua kabupaten/kota se Indonesia yang bisa menyelesaikan Perda terkait perpajakan atau Perda Pajak Daerah yang sudah disetujui DPRD Sidoarjo akhir Tahun 2022 kemarin," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Sementara itu Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono menegaskan optimalisasi perolehan pajak terus dilakukan. Salah satunya dengan melaunching SPPT - PBB secara virtual. Kini pemberitahuan SPPT - PBB dilakukan secara digital melalui email maupun Whatsapp (WA). Layanan ini memudahkan perusahaan maupun masyarakat untuk mengecek tagihan SPPT PBB P2 sekaligus pencetakannya.

"Kami juga menyelesaikan sistem virtual pajak daerah lain-lainnya, pajak hotel, restoran, reklame dan virtualisasi pajaknya sudah diselesaikan Tahun 2022 kemarin," ungkapnya.

Selain itu lanjut Ari Suryono yang juga mantan Kepala DP-MPTSP ini pembayaran PBB saat ini sangat mudah. Cukup datang ke gerai-gerai mini market yang

banyak tersebar di Sidoarjo. Bahkan masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS Bank Jatim. BPPD Pemkab Sidoarjo juga menyediakan layanan chat whatsapp dengan customer servis terkait PBB P2.

"Kita juga sudah menyelesaikan sistem pembayaran QRIS Bank Jatim. Jadi kita bisa melakukan pembayaran PBB dengan QRIS," jelasnya.

Ari Suryono memaparkan penyampaian SPPT Tahun 2023 dilakukan mulai bulan Januari. Tidak seperti sebelumnya yang dilakukan di bulan Maret. Ia berharap penyampaian SPPT di awal tahun dapat mendorong optimalisasi perolehan pajak. Karena itu, dirinya meminta semua pihak mendukung program virtual pajak kali ini. (par/wan)

memo X

### Penerimaan Pajak...

masyarakat dapat membayar pajak pada gerai-gerai terdekat, termasuk oleh BUMDes, sehingga mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak," katanya.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor tersebut berterimakasih kepada semua pihak atas dukungan perolehan pajak daerah.

Terutama Forkopimda Sidoarjo yang selalu bersinergi membangun Kabupaten Sidoarjo. Dikatakannya, saat ini masih ada dua daerah di Indonesia yang telah menyelesaikan Perda

pajaknya. Salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya hal seperti ini tidak terlepas dari sinergi Forkopimda Sidoarjo.

Sementara itu Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, pengoptimalan perolehan pajak terus dilakukan. Salah satunya dengan melaunching SPPT-PBB secara virtual.

Kini pemberitahuan SPPT-PBB dilakukan secara digital melalui email maupun WhatsApp. Layanan tersebut memudahkan perusahaan maupun masyarakat untuk mengecek tagihan SPPT PBB P2 sekaligus pencetakan-

### SAMBUNGAN DARI HALAMAN 5

nya. "Kami juga telah menyelesaikan sistem virtual pajak daerah lainnya, pajak hotel, restoran, reklame, virtualisasi pajaknya sudah kita selesaikan tahun 2022," imbuhnya.

Ari menyebut, pembayaran PBB saat ini sangat mudah. Cukup datang ke gerai-gerai minimarket yang banyak tersebar. Bahkan masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS Bank Jatim. BPPD Sidoarjo juga menyediakan layanan chat WhatsApp dengan customer service terkait PBB P2.

Dalam kesempatan tersebut Ari Suryono mengatakan, penyampaian

SPPT tahun 2023 dilakukan pada bulan ini. Tidak seperti sebelumnya yang dilakukan pada Maret. Dia berharap penyampaian SPPT di awal tahun dapat mendorong optimalisasi perolehan pajak. Oleh karenanya, dia juga meminta dukungan pada program virtual pajak kali ini.

"Harapannya, pak Kades atau pak Lurah ikut membantu mendistribusikan SPPT 2023 yang sudah tersam-

paikan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada lembaga yang telah berkontribusi terhadap pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah serta penghargaan kepada wajib pajak panutan. Selain itu bupati Sidoarjo juga menyerahkan penghargaan kepada desa sebagai desa dengan partisipasi pembayaran PBB P2 tertinggi. (son/vga)

memo X



## PERDA PAJAK DISAHKAN, FORKOPIMDA LAUNCHING SPPT-PBB VIRTUAL

PENERIMAAN PAJAK TEMBUS RP 1,215 TRILIUN

### Sidoarjo, Pojok Kiri

Dalam tiga tahun terakhir, capaian penerimaan pajak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Tahun 2022 kemarin mencatatkan angka Rp. 1.215 Triliun. Pendapatan tersebut bukan hanya diperoleh dari PBB. Namun juga dari berbagai jenis pungutan pajak lainnya. Seperti pajak hotel, restoran, air tanah, pajak reklame maupun pajak parkir serta BPHTB.

Capaian penerimaan pajak itu diungkapkan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP saat melaunching SPPT-PBB Virtual di pendopo Delta Wibawa, Selasa, (10/1). Ia ungkapkan capaian penerimaan pajak tahun 2022 melebihi target. Dari target Rp. 1.068 triliun, diperoleh Rp. 1.215 triliun.

"Capaian pajak ditahun 2022 ini menjadi rekor sepanjang sejarah Rp. 1, 215 triliun," ucapnya.

Ia berharap penerimaan pajak di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Target Rp. 1,230 triliun ditahun 2023 ini dapat tercapai. Bahkan dapat terlampaui seperti target tahun 2022 lalu. Untuk itu ia akan terus mendorong pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Salah satunya dengan launching SPPT-PBB Virtual.

"SPPT-PBB sudah mengarah pada digital, masyarakat dapat membayar pajak pada gerai-gerai terdekat, termasuk

oleh Bumdes, sehingga kedepan tidak ada lagi wajib pajak kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak,"ujarnya.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor tersebut berterimakasih kepada semua pihak atas dukungan perolehan pajak daerah. Terutama Forkopimda Sidoarjo yang selalu bersinergi membangun Kabupaten Sidoarjo. Dikatakannya, saat ini masih ada dua daerah di Indonesia yang telah menyelesaikan Perda Pajaknya. Salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya hal seperti ini tidak terlepas dari sinergi Forkopimda Sidoarjo.

"Kabupaten Sidoarjo merupakan satu dari dua kabupaten kota se Indonesia yang menyelesaikan Perda terkait pajaknya,"ucapnya.

Sementara itu Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah/BPPD Sidoarjo Ari Suryono mengatakan pengoptimalan perolehan pajak terus dilakukan. Salah satunya dengan melaunching SPPT-PBB secara virtual. Kini pemberitahuan SPPT-PBB dilakukan secara digital melalui email maupun whatsapp. Layanan tersebut memudahkan perusahaan maupun masyarakat untuk mengecek tagihan SPPT PBB P2 sekaligus pencetakannya. "Kami juga telah menyelesaikan sistem virtual pajak daerah lainnya, pajak hotel, restoran, reklame, virtualisasi pajaknya sudah kita selesaikan



Forkopimda Sidoarjo saat launching SPPT - PBB Virtual

tahun 2022,"sampainya.

Selain itu lanjut Ari Suryono, pembayaran PBB saat ini sangat mudah. Cukup datang ke gerai-gerai mini market yang banyak tersebar. Bahkan masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS Bank Jatim. BPPD Sidoarjo juga menyediakan layanan chat whatsapp dengan customer servis terkait PBB P2.

"Kita juga sudah menyelesaikan sistem pembayaran QRIS Bank Jatim, jadi kita bisa melakukan pembayaran PBB dengan QRIS,"ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Ari Suryono mengatakan penyampaian SPPT tahun 2023 dilakukan bulan Januari. Tidak seperti sebelumnya yang dilakukan dibulan Maret. Ia berharap penyampaian SPPT diawal tahun dapat mendorong optimalisasi perolehan pajak. Oleh karenanya ia juga meminta mendukung program virtual pajak kali ini.

"Harapannya SPPT tahun 2023 yang sudah tersampaikan kepada desa dan kelurahan agar mohon dengan hormat kepada pak Kades, pak Lurah untuk

membantu mendistribusikan ke warga,"ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada lembaga yang telah berkontribusi terhadap pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah serta penghargaan kepada wajib pajak panutan. Selain itu bupati Sidoarjo juga menyerahkan penghargaan kepada desa sebagai desa dengan partisipasi pembayaran PBB P2 tertinggi. Penghargaan itu juga diserahkan bupati Gus Muhdlor kepada PT. Angkasa Pura 1. (Khol/Dy)



## INGKARI KESEPAKATAN, PKL PASAR LARANGAN SISI TIMUR TAK MAU DIRELOKASI

### Sidoarjo, Pojok Kiri

Harusnya, Senin (09/01) PKL yang menempati sisi timur Pasar Larangan Sidoarjo harus pindah di lokasi baru sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun mereka justru melakukan perlawanan.

Para PKL, yang didominasi emak-emak ini terlihat pasang badan untuk menghadang laju personel Satpol PP yang akan melakukan eksekusi. "Kami hanya cari makan disini, kami juga bayar retribusi, kenapa kami diusir," teriak salah satu pedagang sambil membenteng poster-poster berisi penolakan.

Koordinator tim advokasi pedagang dari LBH Damar Indonesia, Dimas Yemahura Alfarauq menyatakan perlawanan ini dilakukan karena merasa ada kejanggalan-kejanggalan usai terjadinya kesepakatan tentang pengosongan lokasi tersebut yang dilakukan sebelumnya. "Pedagang yang menandatangani surat kesepakatan tersebut, justru tidak diizinkan masuk saat digelar sosialisasi dan pengundian nomor lapak. Kesannya, kegiatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak pengelola pasar. Jelas ini menciderai keterbukaan publik dan pembodohan publik," tandasnya.

Karena itu, pilaknya akan menempuh jalur hukum karena menganggap kebijakan pemer-



intah tersebut telah menyalahi kewenangan sekaligus melanggar hak-hak para pedagang. "Mereka akan tetap bertahan disini, sampai ada solusi yang disepakati bersama antara pemerintah, pedagang dan stakeholder terkait," tegas Dimas.

Pada hari itu, perwakilan pedagang juga melakukan aksi demonstrasi ke kantor dewan dan diterima langsung oleh ketua DPRD Sidoarjo, H Us-

man. Namun dalam pertemuan tersebut, pimpinan dewan tetap meminta para PKL Pasar Larangan untuk memenuhi seluruh hasil kesepakatan sebelumnya. Sementara itu, Kepala bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Hudi Prasetyo menyatakan selama ini pihaknya sudah memberikan ruang komunikasi yang panjang dengan para PKL yang

hendak direlokasi tersebut.

Puncaknya pada 19 Desember lalu, telah dibuat surat kesepakatan bersama antara pihak PKL dengan Pemkab Sidoarjo yang salah satunya berisi tentang batas akhir relokasi tersebut. "Pada prinsipnya, kami minta isi surat kesepakatan itu dijalankan. Artinya hari ini pasar Larangan sisi timur harus bersih dari pedagang," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya akan memberikan batasan bagi para PKL tersebut hingga pukul 24.00 wib malam ini. Dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk bertindak tegas jika selepas jam itu masih ada PKL yang tetap bertahan di sisi Timur Pasar Larangan. "Semua kami serahkan kepada satpol PP untuk melakukan eksekusi," pungkasnya. (Nang)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## ✓ Ketua DPRD Dukung 17 Program MAS

### Sidoarjo, Memorandum

Ketua DPRD Sidoarjo H Usman, mendukung program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan ngobrol santai merajut kebersamaan menguatkan 17 program Sidoarjo MAS (Muhdlor Ali Subandi).

Obrolan gayeng tersebut digeber di RM Handayani, Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo, beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan jika semua program pembangunan yang dilakukan Pemkab bakal didukung sepenuhnya karena itu untuk kemajuan Sidoarjo dan untuk masyarakat.

Termasuk pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, infrastruktur, pembangunan jembatan



Ketua DPRD Sidoarjo H Usman

layang, penuntasan *frontage road* dan lain sebagainya. Dewan juga mendukung penciptaan pasar tradisional yang aman, bersih dan tertib. Program pembangunan yang dilakukan Pemkab, tegas H Usman, untuk Sidoarjo dan hasilnya juga untuk masyarakat.

"Pembangunan tujuannya baik, jadi jelas akan kita dukung,"

tandas H Usman kembali membertegas, Selasa (10/1).

Yang terges, kini Pemkab berusaha menciptakan pasar yang aman, bersih dan tertib.

Sebagaimana diketahui, Kepala Disperindag Widiyantoro Basuki SH dan Kabid Pasar Hoedi Prastyo memimpin di depan menghadapi pengunjuk rasa penertiban Pasar Larangan, Senin (1/9). Penertiban dilakukan supaya pasar setempat bersih, aman dan tertib. Turut hadir dalam pengamanan dari Satpol PP dan kepolisian.

"Alhamdulillah tercipta situasi yang kondusif," ujar Widiyantoro Basuki.

Hoedi Prastyo Kabid Pasar menyampaikan, program pasar aman, bersih dan tertib di Pasar Larangan sesuai petunjuk bupati dan kepala dinas harus diwujudkan dan didukung. (yud/jok/mik)

**MEMORANDUM**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



**NGEYEL:**  
Pedagang kaki lima (PKL)  
Pasar Larangan  
masih berjualan  
di lokasi lama  
kemarin (10/1).

DIMAS MAULANA, JAWA POS

## Dewan Bakal Sidak Lokasi Relokasi Pedagang Pasar Larangan

**SIDOARJO** - Sebagian besar pedagang bagian depan Pasar Larangan kembali berjualan di pelataran depan Pasar Larangan kemarin. Mereka masih menolak pindah.

Pembeli pun masih ramai. Petugas belum membongkar lapak lama. Sementara itu, stan belakang pasar juga mulai ramai pembeli meski masih banyak stan yang kosong karena belum semua pedagang direlokasi. Pemkab Sidoarjo juga belum melakukan penertiban kemarin.

Kepala Satpol PP Sidoarjo Tjarda menyebutkan, pihaknya segera melakukan penertiban. Namun, pihaknya

menunggu hasil mediasi lanjutan dengan pedagang. "Prinsipnya, kami penertiban kapan saja siap," katanya.

Ketua Komisi B DPRD Bambang Pujianto mengaku sudah menerima masukan dan aspirasi dari para pedagang. Pihaknya akan menyampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo sebagai OPD yang menaungi pasar. "Keputusannya, tetap ada OPD yang menaungi. Disesuaikan dengan aturan yang ada. Kami hanya menampung aspirasinya," jelasnya.

Pihaknya akan mendukung jika memang tidak menyalahi aturan. Sebagai

tindak lanjut aspirasi dari pedagang, pihaknya hari ini (11/1) berencana melakukan sidak ke bagian belakang Pasar Larangan atau tempat relokasi. Pihaknya akan mengecek kelayakan stan dan kondisi lapak di sana.

Jika memang kondisinya belum layak, itu bisa menjadi bahan evaluasi dinas. Sebab, Bambang menyebutkan bahwa beberapa pedagang sempat mengeluh bahwa tempat relokasi yang disediakan kurang representatif. "Kami akan cek tempat relokasinya. Layak atau tidaknya," katanya. Hasilnya akan menjadi masukan ke disperindag. (uzi/c12/any)

## Jawa Pos





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Percepat Pembahasan Raperda, Minta Naskah Akademik Segera Disiapkan

KOTA-DPRD bertekad untuk menuntaskan rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (pro-pemperda) tahun ini. Untuk raperda inisiatif dari pemkab, kalangan legislatif meminta eksekutif segera menyiapkan Naskah Akademik (NA)-nya.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Deny Haryanto mengatakan, belajar dari tahun sebelumnya, ada beberapa raperda yang tidak tuntas. Salah satu faktor penyebabnya adalah penyerahan NA yang

terlambat. Sehingga pembentukan panitia khusus (pansus) dan pembahasannya ikut molor.

Untuk itu, dia berharap tahun Pemkab bisa lebih cepat menyiapkan NA dari raperda yang akan dibahas. Sebab menurut dia, untuk membahas suatu raperda itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. "Semua tahapan belum bisa dimulai jika NA belum diserahkan,

Deny menyebutkan, tahun ini ada 17 raperda inisiatif dari eksekutif. Beberapa di antaranya sudah mulai dibahas sejak tahun lalu, namun belum tuntas.

Sehingga pembahasannya dilanjutkan tahun ini dan harus tuntas.

Seperti raperda pajak dan retribusi daerah, raperda penyelenggaraan kabupaten layak anak, penyertaan modal Perumda Delta Tirta, penggabungan kelurahan dalam wilayah terdampak lumpur, dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sejumlah raperda itu selesai dibahas dan akan segera ditetapkan menjadi perda tahun ini.

Saat ini, Bapemperda sedang menunggu NA dari beberapa raperda

lainnya yang belum dibahas sama sekali.

Seperti raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan, pengarusutamaan gender, pelaksanaan usaha kesehatan sekolah, raperda inklusi, gerakan budaya literasi, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tidak hanya untuk pemkab, Deny juga meminta komisi yang mengusulkan raperda juga mempercepat NA. Sebab tahun ini ada enam raperda usulan dewan. "Kami berharap 23 raperda yang masuk propemperda bisa tuntas semua," pungkasnya. (nis/vga)



FOKUS: Rapat paripurna pembahasan raperda yang dilaksanakan akhir tahun lalu







# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Dimas selaku kuasa Hukum dari pedagang pasar tradisional Larangan mengatakan " Aksi ini dilakukan mulai hari Jumat lalu, Harapan dari aksi ini mengawal aspirasi dari teman-teman pedagang pasar tradisional yang sudah membayar retribusi yang secara serta merta akan dilakukan relokasi" ucapnya.

"Pedagang sudah membayar retribusi dengan alasan akan dilakukan penertiban, teman-teman ini bukan pedagang yang tidak mau ditata, siap diberikan masukan dan siap dilakukan penataan tapi harus terbuka tanpa ditutup-tutupi tanpa ada kepentingan tertentu "

"Adapun tanggapan dari Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo Bambang Pujiyanto mengatakan "Rencana relokasi pasar Larangan komisi B akan melakukan sidak di lapangan terkait tempat relokasi dari timur pasat larangan ke barat kurang layak karena penjualan daging dan sampah, maka akan kami sampaikan kepada OPD atau dinas terkait " jelasnya.







” Semua aspirasi dari pedagang kaki lima Pasar Larangan sudah kami terima dan akan lakukan sidak besok ke pasar Larangan ” urainya.

Disinggung ada dugaan pungli pihaknya akan menyampaikan pada OPD terkait yakni Disperindag, selain itu pihaknya juga menghimbau pada pedagang pasar

“Pihaknya menghimbau pada pedagang pasar saya minta taat pada perda yang ada yakni PERDA No.1 Tahun 2018 tentang penertiban, penataan dan pemberdayaan pasar kerakyatan, perda tersebut jangan di langgar oleh pedagang pasar termasuk Disperindag dan Satpol PP ” pungkasnya.







# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



**PORTAL INDONESIA**  
MENGUPAS BERITA SEPUTAR FAKTA



Portal Jatim

## Terima Pendemo, Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo : Kami Perjuangkan Aspirasi Pedagang Pasar Larangan



Redaksi  
10 Januari 2023



Perwakilan dari pedagang Pasar Larangan saat audiensi  
dengan Komisi B Sidoarjo

**SIDOARJO** — Paguyuban pedagang pasar  
Larangan geruduk Gedung perwakilan rakyat  
DPRD Kabupaten Sidoarjo. Selasa  
(10/01/2023).





Rombongan emak-emak pedagang pasar Larangan sampaikan aspirasi dan terus bersholawat berharap bisa diterima Ketua DPRD Sidoarjo.

Pemicu dari orasi paguyuban pedagang pasar karena adanya relokasi pedagang kaki lima di Pasar Larangan Sidoarjo untuk menempati lahan baru .

Para pedagang pasar tradisional pasar Larangan ini mulai melakukan orasi mulai dari pasar Larangan dan geruduk kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo .

Usai melakukan orasi selama satu jam, DPRD Kabupaten Sidoarjo menerima audiensi Pedagang kaki Lima (PKL) pasar Larangan , Audiensi diterima langsung Ketua Komisi B, Bambang Pujiyanto dan sekretaris Komisi B dan anggota.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Breaking News **tan Kepala DLH Situbc**



Hukum dan Kriminal Politik dan Pemerintahan |

Beranda > Jawa Timur > Sidoarjo >

Jawa Timur, Politik dan Pemerintahan, Sidoarjo

## Ketua Komis B DPRD Sidoarjo Menerima Aspirasi Pedagang Pasar Larangan

 Redaksi  
10 Januari 2023







# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



IKUT PINDAH: Salah satu pedagang Pasar Larangan berjualan di lahan relokasi.

HENDRIK MUHLISON/RADAR SIDOARJO

## Tampung Aspirasi Pedagang, Komisi B Bakal Cek Lahan Relokasi

KOTA-Polemik relokasi pedagang Pasar Larangan masih berlanjut. Selasa (10/1) sejumlah pedagang kembali menggelar aksi. Kali ini sasarannya adalah wakil rakyat yang ada di gedung DPRD Sidoarjo.

Kedatangan para pedagang itu diterima dengan baik oleh Komisi B DPRD Sidoarjo. Kuasa hukum pedagang Pasar Larangan Dimas Yemahura mengatakannya, dari aksi yang dige-

lar sejak Jumat (6/1) lalu itu, pedagang berharap ada keadilan.

Dimas menyebutkan, pedagang ini bukannya tidak mau ditata. Namun mereka mengaku telah membayar sejumlah retribusi untuk berjualan di lokasi tersebut.

"Nah ketika diminta untuk pindah, tentu merasa keberatan," katanya.

● Ke Halaman 10



### Tampung Aspirasi...

Ketua Komisi B. DPRD Sidoarjo Bambang Pujiyanto mengaku pihaknya siap menampung aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang. Seperti pembayaran retribusi yang diduga pungli. Pihaknya akan mengecek ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Sebab retribusi yang masuk ke Pemkab seharusnya adalah retribusi kios dan los yang ada di dalam pasar. "Jika pedagang mengaku ada pungutan berkedok retribusi, itu harus diusut," ujarnya.

Selain itu, pedagang juga menyampaikan aspirasi mereka mengenai lahan relokasi yang dinilai kurang layak untuk tempat berjualan. Bambang menyebut, pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengecek kondisinya, hari ini.

Jika memang kurang layak, maka pihaknya akan meminta pemkab untuk membenahi dulu. Sebab selain pembeli, pedagang juga membutuhkan kenyamanan saat berjualan.

Namun Bambang juga mengimbau agar pedagang menaati peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2018 tentang penertiban, penataan, dan pemberdayaan pasar kerakyatan. Dia meminta agar perda tersebut jangan sampai dilanggar. Baik oleh pedagang maupun oleh Satpol PP itu sendiri. (nis/vga)







# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## SDN Sumokali Ajarkan Materi Sekolah Responsif Gender



Kepala SDN Sumokali menempelkan beberapa selebaran terkait Sekolah Responsif Gender.

Sidoarjo, Bhirawa

Awalnya, penerapan program Sekolah Responsif Gender (SRG) di SDN Sumokali, Kec. Candi Sidoarjo, diremehkan, dianggap pelajaran tidak perlu. Namun berkat ketelatenan kepala sekolahnya dan gurunya dalam bersosialisasi usai mengikuti pelatihan-pelatihannya, kini menjadi sisipan materi pembelajaran di setiap kelas.

SRG merupakan program 10 Pilot Project PSGPA (Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak) yang diselenggarakan oleh INOVASI (Inovasi Anak Untuk Sekolah Indonesia) dan Umsida (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo).

Kepala SDN Sumokali Candi Sidoarjo, Siti Khoiriyah S.Pd menjelaskan kalau sebelum mengikuti SRG dalam pembelajaran sehari-hari juga belum bisa membedakan mana gender mana yang bukan. Menurut Khoiriyah itu sudah wajar, biasa-biasa saja, mis-

al dalam gambar-gambar bukunya banyak menonjolkan laki-laki dari pada perempuan.

"Dalam kondisi tersebut, mungkin kami kurang respon itu gender. Ternyata sekarang membuat perbedaan kalau itu gender, kalau perempuan dilemahkan. Itulah yang tidak kita sadari, akhirnya kita sekarang sudah bisa memilah-milah untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan program SRG," jelas Siti Khoiriyah pada (10/1) kemarin.

Ia katakan, awalnya memang ada

beberapa hal yang sangat "sepele" tapi ternyata dari hal tersebut bisa membawa dampak ke anak-anak. Makanya program SRG sekarang ini jadi perhatian, dan dimunculkan setiap pembelajaran anak-anak.

"Oleh karena itu waktu pelatihan kami mengikutkan 2 guru kelas, 1 bendahara dan kepala sekolah. Dan kami pun mengeluarkan kebijakan yang sangat sederhana untuk memilah-milah penerapan SRG itu sendiri," katanya.

Di antaranya, harus ada kamar ganti yang dibedakan, begitu juga untuk kamar mandi. Termasuk adil untuk memberikan tugas yang sama bagi lelaki dan perempuan. Jadi perubahan yang nampak sekali adalah tentang perilaku anak-anak dalam sehari-harinya.

"Misal memandang anak-anak perempuan itu lemah, jadi sasaran

bullying. Jika ada anak perempuan menangis malah lebih lagi menggodanya, usilnya dan lainnya. Namun sekarang sudah tidak ada lagi, sudah memahami bahwa mereka itu sama," terang Siti Khoiriyah.

Lanjutnya, dari program tersebut ternyata orang tua juga sangat mendukung. Kalau orang tua wali murid di sekolah ini dukungannya orang tua itu sangat bagus sekali. Termasuk tugas-tugas sekarang menggiatkan PS (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila).

"Untuk penampilan dan tugas mereka juga sama tidak ada perbedaan. Kalau sekarang sudah sekitar 80 persen untuk penurunan perbedaan laki-laki dan perempuan. Karena kendalanya memang harus sabar dan tidak bisa cepat berubah," ungkapnya (ach,why)

HARIAN  
**Bhirawa**  
Buku Saku Bhirawa



**TANAM** - Para siswa dan siswi kelas IV SD Al Muslim, Waru, Sidoarjo ramai-ramai menanam pohon mangrove di pesisir pantai Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya, Senin (09/01/2023).

## Jaga Kelestarian Lingkungan Siswa SD Al Muslim Kompak Tanam Pohon Mangrove

Sidoarjo, Memo X

Gerakan hari menanam sejuta pohon sedunia Tahun 2023 menjadi momentum untuk menjaga lingkungan alam sekitar. Untuk menciptakan peduli lingkungan dan menjaga kelestarian alam itu, para siswa dan siswi SD Al Muslim, Waru, Sidoarjo menggelar edukasi dan penanaman bibit pohon mangrove.

Kegiatan ini mengambil tema Mari Hijaukan Lingkungan Kita dengan Penanaman Pohon Mangrove. Sebagai sekolah pengampu Adiwiyata Nasional,

SD Al Muslim menjunjung tinggi kepedulian terhadap lingkungan. Penanaman pohon Mangrove dipilih karena memiliki banyak manfaat bagi manusia dan alam. Termasuk bisa mencegah erosi di wilayah pesisir pantai.

Jika erosi pantai terus menerus menggerus permukaan bumi, hal ini dapat mengancam lingkungan manusia. Bahkan, kondisi yang serius ini bisa menjadi bencana alam yang besar.

Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya menjadi kawasan konservasi alam dalam mencegah abrasi di wilayah timur pantau Kota Surabaya. Destinasi ini menggabungkan tempat budidaya dan edukasi. Hutan mangrove menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk menyelamatkan garis pantai dari perairan laut.

Setiap tanggal 10 Januari, masyarakat dunia merayakan hari penanaman sejuta pohon sedunia. Seperti target profile Living Health and Green Sekolah Sang Pemimpin siswa dan siswi kelas IV SD Al Muslim yakni peduli terhadap lingkungan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir tepat pukul 11.30 WIB. Kegiatan berlangsung menyenangkan. Pelaksanaan secara serentak dengan menancapkan pohon yang memiliki banyak manfaat bagi lingkungan. Yakni pohon mangrove.

"Dengan penanaman pohon mangrove ini diharapkan dapat menjadi bagian dari penyelamatan bumi. Setelah bibit pohon tumbuh besar dapat membantu melindungi daratan dari hampasan ombak pantai secara langsung yang memicu abrasi," ujar Kepala SD Al Muslim, Fatimatuz Zahroh kepada Memo X, Senin (09/01/2023).

Tidak hanya itu, lanjut Fatimatuz Zahroh tujuan kegiatan ini adalah agar dapat meningkatkan rasa tanggung para siswa dan siswi terhadap isu lingkungan di jaman sekarang. Apalagi, salah satu akibat banjir dikarenakan abrasi memicu cuaca buruk dalam beberapa tahun terakhir ini.

"Baru-baru ini kita ketahui bersama abrasi memicu cuaca buruk dan tidak menentu atau anomali. Karena itu, saya mengajak siswa dan siswi SD Al Muslim untuk mampu mengetahui manfaat pohon mangrove bagi kehidupan, mampu mengaplikasikan pembelajaran Green Education (GE) dan Leadership sebagai kurikulum unggulan sekolah (SD Al Muslim)," tegas Fatimatuz Zahroh.

Sementara Koordinator Mangrove Information Center Wonorejo, Surabaya, Wito mengaku bersyukur mendapatkan kunjungan dari siswa dan siswi SD Al Muslim. Karena itu, dirinya mewakili manajemen Mangrove Wonorejo mengucapkan terima kasih kepada siswa dan siswi kelas 4 SD Al Muslim atas kunjungan dan tanam pohon mangrove itu.

"Apalagi, anak-anak didik diajari sejak dini ikut menjaga lingkungan dengan menanam pohon mangrove di tempat yang sesuai. Program ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Terlebih kegiatan ini rutin dilakukan, akan menjadi kebiasaan yang baik bagi para peserta didik (pelajar)," tandasnya. (par/wan)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



**TETENGER:** Patung gajah di Pedukuhan Magersari, Sidoarjo, kemarin (10/1). Kawasan tersebut konon dulunya adalah kandang gajah.

## Disebut Kampung Gajah karena Dulunya Kandang Gajah

**SIDOARJO** - Di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, ada yang namanya Pedukuhan Gajah. Sesuai dengan namanya, kampung tersebut dulunya adalah kandang gajah yang jadi tunggangan pemimpin Sidoarjo zaman lampau.

Menurut pegiat sejarah Sidoarjo dr Sudi Harjanto, hampir setiap pemimpin daerah pada masa lampau memiliki gajah sebagai tunggangan. "Seperti di Jogjakarta, kemudian kota lain mesti ada," ungkap pria 50 tahun itu.

Sudi yang juga aktif dalam komunitas Sidoarjo Masa Kuno juga mengatakan bahwa nama Desa Gajah sudah ada di peta lama pada 1800-an. Di sana tertulis jelas nama Desa Gajah. "Bisa saja di tahun itu atau sebelumnya dituliskan nama daerah tersebut berdasar adanya kandang gajah itu," tuturnya.

Meski begitu, Sudi sendiri masih berupaya mencari bukti otentik keberadaan kandang hewan berbelalai itu di Pedukuhan Gajah.

Tokoh yang dituakan di Pedukuhan Gajah Muhammad Syukur mengatakan, penamaan tersebut tidak lepas dari adanya gundukan yang diduga sebagai makam gajah. Gundukan yang dulunya ada di sisi selatan pedukuhan itu kini sudah hilang digantikan dengan perumahan. "Dulu itu tahun 70-an 80-an masih ada. Saat saya kecil main di sana," ungkapnya.

Menurut pria 55 tahun itu, makam gajah di sisi selatan pedukuhan dekat Sungai Pucang itu memiliki lebar sekitar 25 meter persegi. "Ya besar itu dulu," sebutnya.

Syukur pernah mendapat cerita dari kakeknya. Dulu gajah tersebut berasal dari hutan jati (sekarang Desa Jati) yang lari karena diburu. Gajah itu akhirnya sampai di daerah sekitar Pagerwojo atau selatan dan berhasil dikurung warga. "Dikurung dengan bambu gitu, makanya di sana dinamakan Pagerwojo," ungkapnya.

Setelah itu, gajah tersebut ditempatkan di dekat karesidenan yang sekarang bernama Dusun Magersari. "Nah, Magersari itu dinamakan demikian karena tempatnya mager gajah," tutur warga asli Pedukuhan Gajah itu. Ketika mati, gajah tersebut dikuburkan di daerah yang sekarang jadi Perumahan Magersari Permai.

"Kembali namanya juga cerita kebenaran, ini perlu ada pembuktian lagi," tuturnya. Karena terkenalnya cerita tersebut di kalangan penduduk asli yang sudah berumur, akhirnya dibangunlah patung gajah di tengah-tengah pedukuhan sebagai simbol. "Bangga saya, makanya banyak orang sini *seneng nyebut* asalnya dari Gajah bukan Magersari," tuturnya. (eza/c17/any)

## Jawa Pos